

A. Judul

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, BIAYA RINGAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINGKAT PENUNTUTAN

(Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)

Ilham Misbahus Syukri, Dr. Nurini Aprilianda, SH. MHum, Abdul Madjid, SH. MHum

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
kopikomodo@yahoo.com**

B. Abstrak

Abstrak

Pemilihan judul dilatar belakangi oleh fakta lamanya penanganan kasus tindak pidana korupsi di tingkat penuntutan di Kota Malang, khususnya pada Kejaksaan Negeri Malang. Patut dipertanyakan mengapa usaha Kejaksaan dalam memberantas korupsi terkesan kurang serius, apa penyebab proses penuntutan menjadi lebih lama sehingga tidak tercipta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ironis. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana implementasi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dalam peradilan tindak pidana korupsi di tingkat penuntutan saat ini dan apa kendala dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum guna memaksimalkan implementasi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dalam peradilan tindak pidana korupsi di bidang penuntutan. Penulisan karya tulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan di masyarakat untuk hendak diteliti dari aspek hukum dan penerapan hukumnya. Bahan hukum primer dan sekunder akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu memaparkan seluruh hasil studi lapangan dan hasil studi literatur, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan, kemudian melakukan analisa data dan selanjutnya digunakan untuk membahas permasalahan terkait implementasi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dalam tindak pidana korupsi di tingkat penuntutan.

Kata Kunci: Penuntutan, Kejaksaan, Korupsi

Abstract

Choosing a title background by the fact the length of the handling of corruption cases at the level of prosecution in Malang, especially in Malang District Attorney. As for why the Attorney efforts in combating corruption seem less serious, what caused the prosecution to be longer so that the principles of justice are not created fast, simple, and low cost. Irony. Based on this, this paper raised the issue of how the formulation of the principle of judicial implementation of fast, simple, low cost of corruption in the criminal justice prosecution at this time and what constraints and how the efforts to be made public prosecutor in order to maximize the implementation of the principle of speedy justice, simple, low cost in judicial corruption in the field of prosecution. Writing papers using juridical sociological method, which is a research approach that examines the problems in the community to want to study the legal aspects and the application of the law. Primary and secondary legal materials will be analyzed using descriptive analysis techniques are explained throughout the analytical results of field studies and the results of the study of literature, which is used as a reference in resolving legal issues. The results were obtained answers to the problems, then analyze the data and then used to discuss issues related to the implementation of the principle of justice is fast, simple, low cost in the level of corruption in the prosecution.

Keywords : Prosecution, Attorney, Corruption

C. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia sudah semakin menyebar ke seluruh aspek pemerintahan sejak tahun 1980. Upaya pemberantasanpun masih tersendat-sendat hingga saat ini.¹ Korupsi sudah ada sejak berdirinya negara Republik Indonesia ini yang dilakukan oleh para penguasa yang mempunyai kekuasaan atau lebih sering disebut dengan istilah "*white collar crime*" atau kejahatan kerah putih.

Berdasarkan *Corruption Perceptions Index Ranks 2012*, Lembaga *Transparency International Indonesia (TII)* melansir peringkat korupsi Indonesia berada di angka 32. Indeks persepsi korupsi ini merupakan indikator gabungan yang mengukur tingkat persepsi korupsi dari total 176 negara.² Sebelumnya

¹ Ermansyah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 4.

² Transparency International, 2013, *The Corruption Perceptions Index*, <http://www.transparency.org/cpi2012/results>, diakses 26 September 2013.

Transparency International menyatakan sejak 1998-2004 Indonesia selalu berada dalam peringkat sepuluh besar negara terkorup di dunia.³

Sebelum tahun 2009, secara umum pengadilan tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Bab VII Pasal 53.⁴ Terdapat dualisme hukum mengenai dasar hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Untuk meniadakan dualisme yang terjadi dalam sidang perkara-perkara korupsi dan untuk mencapai kepastian hukum, maka harus ada satu pengadilan yang secara khusus menangani kasus korupsi. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Undang-Undang Pengadilan Tipikor menitikberatkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Ibu Kota Provinsi.

Setelah dibentuknya Pengadilan Tipikor dan pemusatan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, timbul berbagai permasalahan baru yang diakibatkan oleh perubahan sistem. Baik dari segi sistem itu sendiri, aparat penegak hukum, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan saling terkait satu dengan yang lainnya, saling terkoordinir, jadi apabila salah satu lembaga pengadilan ini diubah atau diperbarui maka secara otomatis lembaga lain yang terkait seperti Kejaksaan dan Kepolisian turut menyesuaikan dan beradaptasi. Keberadaan Pengadilan Tipikor dinilai tidak efisien karena hanya akan menimbulkan penumpukan perkara yang dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia. Terdapat ketidaksesuaian jumlah kasus yang ditangani oleh satu lembaga dan jumlah pihak yang berperan. Selain adanya faktor penumpukan kasus, keberadaan Pengadilan Tipikor juga tidak logis, karena secara geografis wilayah teritorial Indonesia sangat luas, jika seluruh kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dari Sabang sampai Merauke harus

³ *Ibid.*

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 159.

dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pusat, maka dari kondisi tersebut dapat dipastikan sulit untuk memenuhi asas peradilan dalam KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi para pencari keadilan. Adanya Pengadilan Tipikor di daerah, juga berdampak bagi wilayah Jawa Timur, dimana Pengadilan Tipikor berkedudukan di Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur.

Salah satu kendala mencolok yaitu pada seksi penuntutan pada lembaga Kejaksaan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).⁵

Beberapa tahun ini Pengadilan Tipikor Surabaya menjadi sorotan, sebab dari 1.800 kasus korupsi yang diterima Kejaksaan Agung, dan total jumlah kasus korupsi yang masuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa timur terdapat 226 perkara, dimana jumlah tersebut merupakan jumlah perkara korupsi tertinggi di Indonesia.⁶ Dapat dibayangkan, di Jawa Timur dengan 226 perkara korupsi harus diadili oleh satu pengadilan tipikor. Pengadilan Tipikor Surabaya membawahi kasus korupsi yang berada di daerah kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur, salah satunya Kota Malang. Namun dari pelimpahan berkas penuntutan perkara tersebut, timbul permasalahan signifikan bagi penuntutan perkara korupsi, salah satunya yaitu mengenai jarak antara Kejaksaan yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur dengan Pengadilan Tipikor yang terletak di Kota Surabaya. Ketidak sesuaian jarak tempuh tentunya menimbulkan permasalahan baik dari segi efisiensi dan profesionalitas kinerja aparat penegak hukum. Permasalahan ini menjadi rumit, sebab selain jarak yang jauh, ditambah dengan banyaknya jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Malang.

⁵ *Pengertian Kejaksaan*, http://www.Kejaksaan.go.id/tentang_Kejaksaan.php?id=1, diakses 12 Oktober 2013.

⁶ Dakta, 2013, *Jawa Timur Juara Satu Dalam Jumlah Kasus Korupsi*. <http://www.dakta.com/jawa-timur-juara-satu-dalam-jumlah-kasus-korupsi.html>, diakses 5 November 2012

Hal inilah yang menjadikan salah satu faktor utama agar suatu mekanisme sistem peradilan khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat bekerja semaksimal mungkin, sehingga perkara korupsi dapat diselesaikan dengan baik, untuk mencapai adanya kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum. Salah satu caranya ialah memenuhi peranan dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di tingkat penuntutan yang saat ini sering tidak terpenuhi.

D. Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dalam peradilan tindak pidana korupsi di tingkat penuntutan saat ini.
2. Apa kendala dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum guna memaksimalkan implementasi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dalam peradilan tindak pidana korupsi di bidang penuntutan.

E. Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk hendak diteliti terutama dari segi aspek hukum dan penerapan hukumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi lapangan dan kepustakaan. Jenis dan sumber data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengadakan penelitian menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Jaksa di Kejaksaan Negeri Malang dan responden adalah dua Jaksa pada Seksi Tindak Pidana Khusus yang pernah melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Dalam menganalisa data digunakan menggunakan metode deskriptif analisis,

yaitu memaparkan seluruh hasil studi lapangan dan hasil studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian menganalisa data-data yang diperoleh dan selanjutnya digunakan untuk membahas permasalahan.

Atas dasar kewenangan, fungsi, dan tugas ini maka penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Malang yang merupakan Kejaksaan Negeri Tipe A. Didasari oleh pembagian pola organisasi didasarkan atas kedudukan, beban kerja, dan atau kekhususan suatu daerah. Mekanisme kerja Kejaksaan Negeri Malang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Sejarah singkat menyebutkan Kejaksaan Negeri Malang mengalami beberapa kali perpindahan lokasi, pada tahun 1957 berada di Jalan Pattimura Kota Malang dan pada tahun 2005 hingga saat ini berada di Jalan Simpan Panji Suroso Nomor 5 Kota Malang.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, diharapkan dapat berjalan dengan cepat sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa:

“Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada prinsipnya melaksanakan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun hingga saat ini masih ada perkara tindak pidana korupsi yang baru mendapatkan putusan setelah melampaui batas waktu, meskipun undang-undang jelas telah memberikan batasan selama 120 hari kerja. Dalam hal ini penerapan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan di Kejaksaan Negeri Kota Malang belum dapat sepenuhnya diterapkan atau masih belum bisa berjalan secara optimal.

Data survey menunjukkan kinerja Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam masa kerja 3 (tiga) tahun Kejaksaan Negeri Malang menangani 5 (lima) kasus korupsi pada taraf penuntutan. Untuk asas peradilan sederhana, apabila menyangkut kasus korupsi yang telah terskenario secara terorganisir dan sistematis maka untuk proses persidangan baik penyidikan, maupun penuntutan tidak akan dapat berjalan secara sederhana. Hal ini terlihat pada penanganan kasus tahun 2011. Terjadi penyalahgunaan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas pada Dinas Perhubungan Kota Malang yang melibatkan tiga terdakwa, yang kemudian ketiga terdakwa tersebut diperiksa dan diadili secara individu. Proses persidangan yang berjalan secara individu merupakan dampak dari kesulitan jaksa penuntut dalam merumuskan dan mengkonstruksikan pasal-pasal yang didakwakan apabila terdakwa diperiksa dalam satu penanganan. Sehingga jaksa penuntut tidak ingin mengambil resiko lepasnya terdakwa dari jeratan hukum yang berakibat pada penanganan perkara dilakukan secara terpisah.⁷

Penanganan kasus korupsi secara terpisah juga merupakan salah satu faktor penghambat penerapan asas peradilan cepat, karena apabila diperiksa secara terpisah otomatis akan terjadi pengulangan penanganan perkara yang berdampak pada pemborosan waktu dan tenaga yang mengganggu fokus jaksa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Dalam penanganan kasus diatas audit dari BPK dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar kerugian yang dialami oleh negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Yang menjadi permasalahan adalah BPK untuk wilayah Jawa Timur hanya satu dan terletak di Kota Surabaya, dan sekarang prosesnya semakin memakan waktu karena hasil audit BPK Surabaya harus dilimpahkan terlebih dahulu ke Jakarta sebelum diterima oleh pihak kejaksaan.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, 27 Januari 2014.

Sehingga penyidik dalam membuat berkas perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan sangatlah lama dan tidak terwujud peradilan yang cepat.⁸

Pembuatan berkas perkara yang sangat lama ini juga terdapat faktor dimana tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kaitanya dengan proses penyidikan kasus korupsi, undang-undang ini mengharuskan ada formalitas tambahan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.⁹ Sehingga prosesnya sangat lama dalam proses penyidikan dan tidak terwujud asas peradilan sederhana.

Proses penanganan kasus tindak pidana korupsi membutuhkan dana operasional yang tinggi. Untuk setiap penanganan perkara membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yang tidak sebanding dengan jumlah di kemablikan. Besarnya pengeluaran biaya penanganan korupsi selama ini di Kejaksaan tidak terwujud asas peradilan dengan biaya ringan.¹⁰

Dari penjelasan yang diatas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya jaksa masih mengalami kendala antara lain:

- Beban kerja berlebih yang diemban oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Malang menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan asas peradilan cepat dalam perkara tindak pidana korupsi, karena dengan berbagai macam perkara yang harus ditangani oleh pihak kejaksaan diluar perkara tindak pidana korupsi, sehingga ada kasus tindak pidana korupsi yang terhambat dalam proses penuntutan.
- Ketidakhadiran terdakwa ataupun saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada saat proses persidangan.
- Jaksa penuntut umum sering kali mengalami kesulitan untuk membuktikan kerugian negara dalam jumlah sebenarnya, yang dikorup oleh terdakwa

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, 27 Januari 2014.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, 27 Januari 2014.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, 27 Januari 2014.

secara individual sebagaimana hasil audit yang didapat dari BPK di persidangan. Karena kebanyakan kasus korupsi melibatkan lebih dari satu orang, sehingga mustahil bagi Jaksa untuk membuktikan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang benar.¹¹

- Terdakwa yang jatuh sakit pada saat proses peradilan maka menjadi tanggungjawab jaksa, meskipun sudah pelimpahan perkara. Jaksa penuntut bertugas dan berkewajiban untuk memastikan kondisi terdakwa dalam kondisi tercover baik secara medis maupun dari segi pengamanan. Hal ini didasarkan pada ketentuan KUHAP dimana Jaksa wajib melimpahkan perkara ke pengadilan, dalam konteks ini yang dilimpahkan hanya perkaranya saja, bukan tanggungjawabnya terhadap terdakwa.¹²
- penanganan kasus tindak pidana korupsi butuh dana operasional yang tinggi. Untuk setiap penanganan perkara membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yang tidak sebanding dengan jumlah di kemablikan. Besarnya pengeluaran biaya penanganan korupsi selama ini di kejaksaan tidak terwujud asas peradilan dengan biaya ringan.¹³

Terkail permasalahan diatas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Malang guna proses penuntutan antara lain:

- Untuk mengatasi kendala beban kerja berlebih dapat dilakukan upaya penambahan anggota dalam menangani kasus. Dalam mengatasi keterbatasan jaksa yang dimiliki, Kajari dapat membuat laporan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya.
- Untuk mengatasi kendala Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi-saksi ke Pengadilan Tindak Pindana Surabaya dapat dilakukan dengan cara melakukan

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono, SH., selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Malang, 27 Januari 2014.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, 27 Januari 2014.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, 27 Januari 2014.

koordinasi dengan atasan saksi tersebut jika statusnya adalah pejabat pemerintahan atau karyawan swasta, guna membantu menghadirkan saksi tersebut di persidangan. Upaya mengatasi kendala penuntut umum pada saat pelaksanaan sidang pertama di Pengadilan Tipikor Surabaya. Hendaknya penetapan hari sidang diterima oleh penuntut umum sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang, sehingga pemberitahuan kepada terdakwa dapat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari menjelang sidang.

- Upaya jaksa penuntut umum sulit membuktikan kerugian negara secara individual terdakwa. Dalam hal ini Jaksa penuntut umum dituntut untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki oleh Jaksa dan dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan untuk menumbuh kembangkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Dalam hal terdakwa jatuh sakit ketika proses persidangan berjalan, dan dibutuhkan perawatan medis di rumah sakit maka hal ini menjadi tanggungjawab jaksa untuk memberikan pelayanan baik bersifat medis maupun keamanan. Untuk itu biasanya jaksa mengupayakan penjagaan disekitar terdakwa baik dilakukan pada saat dirumah sakit maupun setelahnya, hal ini dilakukan dengan maksud agar terdakwa tidak kabur dan melarikan diri saat proses persidangan berjalan.¹⁴
- Upaya pemenuhan asas biaya ringan dapat dilakukan dengan cara mengklasifikasikan jenis perkara tindak pidana korupsi berdasarkan nominal kerugian yang dialami.

F. Penutup

Kesimpulan terkait isu yang dibahas pada skripsi ini antara lain implementasi penerapan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan masih belum bisa optimal dikarenakan berbagai faktor penghambat yang terjadi mulai dari proses penyelidikan sampai putusan. Karena jaksa dalam melakukan tugas

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, 27 Januari 2014.

dan wewenang memenuhi kendala sehingga untuk melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan dalam undang.

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, saran yang diajukan terkait isu yang dibahas pada skripsi ini antara lain sebaiknya pembentukan pengadilan TIPIKOR dibentuk di setiap kota besar yang ada di Jawa Timur untuk memudahkan para menuntut umum dalam menghadapi kendala yang ada, Adanya prioritas terhadap penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi dinilai sangat merugikan bagi seluruh kalangan, dan juga Setiap jaksa diberi pelatihan atau diklat khusus secara berkala agar pengetahuan menangani tindak pidana korupsi bertambah sehingga dalam menangani tindak pidana korupsi bisa maksimal mengembalikan kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi.

G. Daftar Pustaka

Ermansyah Djaja, **Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta.

Dakta, 2013, *Jawa Timur Juara Satu Dalam Jumlah Kasus Korupsi*. <http://www.dakta.com/jawa-timur-juara-satu-dalam-jumlah-kasus-korupsi.html>, (5 November 2012)

Pengertian **Kejaksaan**, http://www.Kejaksaan.go.id/tentang_Kejaksaan.php?id=1, (12 Oktober 2013)

Transparency International, 2013, *The Corruption Perceptions Index*, <http://www.transparency.org/cpi2012/results>, (26 September 2013)